



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon 4156000
Medan Kode Pos 20153

PENGUMUMAN PENDAFTARAN

Nomor: 027/062/PBJ/I/2022

Tentang

**PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KOMODITAS PRODUK PAKAIAN DINAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

Bersama ini kami mengundang para Penyedia Pakaian Dinas di Provinsi Sumatera Utara untuk turut serta dalam proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sumatera Utara. Adapun rincian produk, persyaratan Penyedia dan produk adalah sebagai berikut :

1) Informasi Produk

1. Kategori Produk

No	Kategori	Sub Kategori
1	Pakaian Jadi	Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki
		Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih
		Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Tenun/Lurik/Pakaian Khas Daerah
		Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
		Pakaian Dinas Upacara (PDU)
		Pakaian Sipil Harian (PSH)
		Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
		Pakaian Sipil Resmi (PSR)
		Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia
		Pakaian Olahraga
2	Bahan Pakaian	Batik/Tenun/Lurik/Pakaian Khas Daerah
		Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

2. Atribut Produk

➤ **Kategori Pakaian Jadi**

a. Sub Kategori Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Hasil Uji Laboratorium
12. Model PDH (Pria/Wanita)
13. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
14. Model Bawahan PDH (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)

15. Warna Pakaian
16. Ukuran Pakaian
17. Jenis Bahan Pakaian
18. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
19. Keterangan Lainnya

b. Sub Kategori Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Hasil Uji Laboratorium
12. Model PDH (Pria/Wanita)
13. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
14. Model Bawahan PDH (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)
15. Warna Pakaian
16. Ukuran Pakaian
17. Jenis Bahan Pakaian
18. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
19. Keterangan Lainnya

c. Sub Kategori Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Tenun/Lurik/Pakaian Khas Daerah

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Hasil Uji Laboratorium
12. Model PDH (Pria/Wanita)
13. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
14. Corak/Motif
15. Ukuran Pakaian
16. Jenis Bahan Pakaian
17. Keterangan Lainnya

d. Sub Kategori Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai

10. URL Produk
11. Hasil Uji Laboratorium
12. Model PDH (Pria/Wanita)
13. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
14. Model Bawahan PDH (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)
15. Warna Pakaian
16. Ukuran Pakaian
17. Jenis Bahan Pakaian
18. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
19. Keterangan Lainnya

e. Sub Kategori Pakaian Dinas Upacara (PDU)

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Hasil Uji Laboratorium
12. Model PDH (Pria/Wanita)
13. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
14. Model Bawahan PDH (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)
15. Warna Pakaian
16. Ukuran Pakaian
17. Jenis Bahan Pakaian
18. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
19. Keterangan Lainnya

f. Sub Kategori Pakaian Sipil Harian (PSH)

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Hasil Uji Laboratorium
12. Model PDH (Pria/Wanita)
13. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
14. Model Bawahan PDH (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)
15. Warna Pakaian
16. Ukuran Pakaian
17. Jenis Bahan Pakaian
18. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
19. Keterangan Lainnya

g. Sub Kategori Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Hasil Uji Laboratorium
12. Model PDH (Pria/Wanita)
13. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
14. Model Bawahan PDH (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)
15. Warna Pakaian
16. Ukuran Pakaian
17. Jenis Bahan Pakaian
18. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
19. Jumlah Kancing
20. Keterangan Lainnya

h. Sub Kategori Pakaian Sipil Resmi (PSR)

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Hasil Uji Laboratorium
12. Model PDH (Pria/Wanita)
13. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
14. Model Bawahan PDH (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)
15. Warna Pakaian
16. Ukuran Pakaian
17. Jenis Bahan Pakaian
18. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
19. Jumlah Kancing
20. Keterangan Lainnya

i. Sub Kategori Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Hasil Uji Laboratorium

12. Model Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (Pria/Wanita)
13. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
14. Model Bawahan Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)
15. Ukuran Pakaian
16. Jenis Bahan Pakaian
17. Keterangan Lainnya

j. Sub Kategori Pakaian Olahraga

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Model Pakaian Olahraga (Pria/Wanita)
12. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
13. Model Bawahan Pakaian Olahraga
14. Warna Pakaian
15. Ukuran Pakaian
16. Jenis Bahan Pakaian
17. Logo Instansi (Bordir/Sablon)
18. Keterangan Lainnya

➤ **Kategori Bahan Pakaian**

a. Sub Kategori Batik/Tenun/Lurik/Pakaian Khas Daerah

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Hasil Uji Laboratorium
12. Corak/Motif
13. Ukuran Kain
14. Jenis Bahan Pakaian
15. Jenis Pewarna
16. Keterangan Lainnya

b. Sub Kategori Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)

9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Hasil Uji Laboratorium
12. Ukuran Kain
13. Jenis Bahan Pakaian
14. Keterangan Lainnya

2) SYARAT PENYEDIA

Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu Produsen dan Distributor/Agen Pakaian Dinas. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dapat berupa Badan Usaha atau Perorangan sebagai berikut :

- **Tipe Pelaku Usaha (calon Penyedia Katalog) :**

- a. Kategori Pakaian Jadi

- ☒ Produsen

- b. Kategori Bahan Pakaian

- ☒ Produsen

- ☒ Distributor/Agen

- **Syarat Pelaku Usaha**

- KATEGORI PAKAIAN JADI**

- **Syarat Pelaku Usaha Berbadan Usaha**

- a. Kualifikasi Administrasi

- (1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:

- a) KBLI 14111 (Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil);
- b) KBLI 14120 (Penjahit dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan); atau
- c) Bidang lain yang sejenis.

- (2) Mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan konfirmasi status wajib pajak;

- (3) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan

- a) Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor;
- b) Bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/kantor;
- c) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU)/(SKDP); atau
- d) Dokumen lainnya yang sejenis.

- (4) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :

- a) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan);
- b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- d) Kartu Tanda Penduduk.

- (5) Tidak masuk daftar hitam.

b. Kualifikasi Teknis

(1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b) Penyediaan barang pada kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

(2) Penyediaan dengan kualifikasi usaha kecil yang baru terdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana butir (1) huruf a) dan b) di atas.

• **Syarat Pelaku Usaha berbentuk Perseorangan**

a) **Kualifikasi Administrasi**

- (1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- (2) Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- (3) Memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak;
- (4) Memiliki nomor rekening;
- (5) Tidak masuk dalam daftar hitam;

b) **Kualifikasi Teknis**

(1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- (b) Penyediaan barang pada kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

(2) Penyediaan dengan kualifikasi usaha kecil yang baru terdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana butir (1) huruf a) dan b) di atas.

• **Syarat Teknis**

- 1) Melampirkan hasil uji laboratorium untuk kain Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki dan Pakaian Dinas Harian (PDH) putih dari Laboratorium Pengujian Tekstil dan Kerajinan yang terdaftar atas nama :
 - a. Calon penyedia yang melakukan penawaran
 - b. Produsen kain
 - c. Distributor kain; atau
 - d. Perusahaan pemegang merek
- 2) Hasil uji laboratorium sebagaimana angka (1) di atas akan dievaluasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Melampirkan surat pernyataan memiliki peralatan (milik sendiri atau sewa) dan tenaga teknis minimal sebagai berikut :

- a) Peralatan
 - (1) Mesin jahit;
 - (2) Mesin Obras; dan
 - (3) Mesin/Alat Potong Kain
- b) Tenaga Teknis berupa Tenaga Jahit
- 4) Apabila memiliki merek, maka wajib melampirkan :
 - a) Sertifikat merek yang masih berlaku dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama perusahaan yang mengajukan penawaran; atau
 - b) Memiliki izin/lisensi dari pemilik merek
- 5) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas :
 - a) Calon penyedia dapat melakukan penawaran terhadap Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas, sebagai berikut :
 - (1) Keseluruhan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
 - (2) Sebagai Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; dan/atau
 - (3) Tidak menawar keseluruhan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
 - b) Jika menawar keseluruhan atau sebagai Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas maka wajib mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Ukuran Pakaian Dinas :

Calon Penyedia dapat melakukan penawaran terhadap Ukuran Pakaian Dinas sebagai berikut :

 - a) Ukuran Standar (S, M, L, XL, dll); dan/atau
 - b) Ukuran *Custom* (sesuai dengan hasil pengukuran setiap pegawai);
- **Syarat Harga**
 - 1) Surat pernyataan keabsahan/kebenaran informasi produk dan harga yang ditandatangani oleh penawar atau wakil sah badan usaha (apabila berbadan usaha) dan bermaterai cukup.
 - 2) Harga penawaran sudah termasuk :
 - a) Biaya Produksi;
 - b) Biaya pengemasan
 - c) Overhead dan Keuntungan; dan
 - d) Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 3) Harga belum termasuk biaya pengiriman.

KATEGORI BAHAN PAKAIAN

- **Syarat Pelaku Usaha Berbadan Usaha**
 - a. Kualifikasi Administrasi
 - (1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - a) KBLI 131 (Industri Tekstil)
 - b) KBLI 13121 (Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
 - c) KBLI 13122 (Industri Kain Tenun Ikat)

- d) KBLI 13133 (Industri Pencetakan Kain)
- e) KBLI 13134 (Industri Batik)
- f) KBLI 13999 (Industri Tekstil Lainnya YTDL)
- g) KBLI 14131 (Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil)
- h) KBLI 46411 (Perdagangan Besar Tekstil) atau
- i) Bidang lain yang sejenis.
- (2) Mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan konfirmasi status wajib pajak;
- (3) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan
 - a) Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor;
 - b) Bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/kantor;
 - c) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU)/(SKDP); atau
 - d) Dokumen lainnya yang sejenis.
- (4) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan);
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Tidak masuk daftar hitam.
- b) Kualifikasi Teknis
 - (1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - (b) Penyediaan barang pada kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - (2) Penyediaan dengan kualifikasi usaha kecil yang baru terdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana butir (1) huruf a) dan b) di atas.

• **Syarat Pelaku Usaha berbentuk Perseorangan**

- a) Kualifikasi Administrasi
 - (1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - (2) Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
 - (3) Memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak;
 - (4) Memiliki nomor rekening;
 - (5) Tidak masuk dalam daftar hitam;
- b) Kualifikasi Teknis
 - (1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (c) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di

lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

(d) Penyediaan barang pada kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

(2) Penyediaan dengan kualifikasi usaha kecil yang baru terdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana butir (1) huruf a) dan b) di atas.

- **Syarat Teknis**

1) Apabila memiliki Merek :

a. Penyedia Jenis Produsen :

Wajib melampirkan Sertifikat Merek yang masih berlaku dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi atas nama perusahaan yang mengajukan penawaran atau memiliki izin/lisensi dari pemilik merek.

b. Penyedia Jenis Distributor :

Wajib melampirkan surat penunjukan sebagai distributor untuk merek yang ditawarkan dari Produsen

2) Melampirkan surat penunjukan/ kerjasama yang menjelaskan bahwa penawar merupakan distributor atau agen dari Produsen.

3) Melampirkan surat pernyataan memiliki peralatan (milik sendiri atau sewa) dan tenaga teknis minimal sebagai berikut :

a) Peralatan

(1) Peralatan batik tulis (untuk yang menawarkan batik tulis)

(2) Mesin printing kain (untuk yang menawarkan batik printing)

(3) Alat cap untuk kain batik (untuk yang menawarkan batik cap); dan

(4) Tempat penceluban/pewarnaan dan penjemuran kain batik

b) Tenaga Teknis berupa tenaga pengrajin Batik.

- **Syarat Harga**

1) Surat pernyataan keabsahan/kebenaran informasi produk dan harga yang ditandatangani oleh penawar atau wakil sah badan usaha (apabila berbadan usaha) dan bermaterai cukup.

2) Harga penawaran sudah termasuk :

a) Biaya Produksi;

b) Biaya pengemasan

c) Overhead dan Keuntungan; dan

d) Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Harga belum termasuk biaya pengiriman.

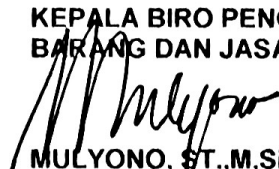
1) MEKANISME PENCANTUMAN BARANG/JASA KATALOG ELEKTRONIK

1. Pelaku Usaha yang berminat perlu memiliki akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terlebih dahulu. Bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki akun SPSE dapat melakukan proses pendaftaran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdekat.

2. Selanjutnya, Pelaku Usaha dapat melakukan pendaftaran mulai tanggal 7 Januari 2022 melalui aplikasi <https://e-katalog.lkpp.go.id/pengumuman> kemudian pilih etalase produk Pengumuman Pendaftaran Pakaian Dinas Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya menyampaikan bukti dukung :

- a. Upload scan bukti dokumen syarat Penyedia dan Syarat Produk sebagaimana tersebut di atas.
 - b. Input informasi spesifikasi produk dan harga pada aplikasi Katalog Elektronik.
3. Perlu kami sampaikan bahwa proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik ini mengacu pada Surat Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang dapat diunduh pada website www.jdih.lkpp.go.id.
4. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi batch kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya. Bersama ini kami sampaikan agar para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini, wajib mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

**KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA SETDAPROVSU**



**MULYONO, ST.,M,SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740511 200003 1 003**